

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah suatu platform yang dirancang untuk memudahkan dan menunjang hamper seluruh aktifitas penggunanya. Kemajuan di bidang teknologi informasi telah mengakibatkan perubahan cepat dalam umur teknis dan umur ekonomis dari perangkat lunak dan perangkat keras yang ada. Faktanya, pengguna selalu bersaing untuk meningkatkan penggunaan teknologi terbaru ini. Dalam perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, pengguna media sosial menjadi semakin tergantung pada penggunaan media sosial. Kenyataan ini memiliki pengaruh yang menguntungkan dan merugikan bagi para pengguna. Terkait dengan penggunaan media sosial, banyak manfaat yang diberikan kepada para penggunanya. Dengan segala kemudahan yang diberikan oleh platform media sosial (Doni, 2017).

Media sosial adalah suatu tempat di internet yang memungkinkan pengguna untuk terlibat, berbagi, dan menciptakan konten meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum, dan dunia maya. Banyak orang di seluruh dunia menggunakan blog, jejaring sosial, dan wiki sebagai media sosial yang paling populer (Putri, 2016).

2. Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial memiliki beragam jenis yang semuanya digunakan untuk mendapatkan akses secara instant, terdapat beberapa jenis-jenis media sosial diantaranya:

a. Social Networking

Social networking adalah alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berinteraksi, termasuk dampak-dampak yang timbul dari interaksi tersebut di dunia maya. Inti dari situs jejaring sosial adalah pengguna yang menciptakan koneksi dengan teman baru. Seringkali, terbentuknya hubungan pertemanan baru berasal dari minat yang serupa, seperti memiliki hobi yang sama. *Facebook* dan *Instagram* merupakan contoh-contoh jaringan sosial yang dapat dicontohkan.

b. *Blog*

Blog merupakan platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah aktivitas sehari-hari mereka, memberikan komentar, dan berinteraksi dengan pengguna lainnya, termasuk berbagi tautan *website*, informasi, dan hal-hal lainnya.

c. *Microblogging*

Microblogging merupakan salah satu bentuk platform media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan pendapat serta mengunggah kegiatan mereka. Dalam sejarahnya, jenis media sosial ini muncul dengan diperkenalkannya *Twitter* yang hanya memiliki batasan 140 karakter.

d. *Media Sharing*

Media sosial memungkinkan pengguna untuk menyebarkan serta menyimpan konten multimedia seperti dokumen, video, audio, dan gambar secara daring. Salah satu contoh yang dapat digunakan untuk media sharing adalah *Youtube, Instagram, dan Facebook*.

e. *Social Bookmarking*

Social Bookmarking adalah sebuah platform yang berfungsi untuk mengatur, menyimpan, mengelola, dan mencari informasi atau berita secara online.

f. *Wiki*

Wiki atau platform konten bersama adalah situs di mana kontennya dibuat melalui kerjasama pengguna. Setiap pengguna internet memiliki kemampuan untuk memodifikasi atau mengedit konten yang telah dipublikasikan (Nasrullah, 2015, hlm 39).

3. Dampak Media Sosial

a. Dampak Media Sosial Pada Peserta Didik

Media sosial memiliki dampak positif dan negatif pada peserta didik. Dampak positifnya meliputi kemudahan memperluas jaringan pertemanan, meningkatkan motivasi belajar melalui interaksi online, serta menumbuhkan sifat bersahabat, perhatian, dan empati. Namun, dampak negatifnya termasuk penurunan motivasi belajar karena terlalu terpicat media sosial, gangguan konsentrasi, serta

berkurangnya minat berkomunikasi dan empati di kehidupan nyata akibat penggunaan berlebihan (Mulyono, 2021).

b. Dampak Media Sosial Pada Pekerja

Penggunaan media sosial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai, terutama dalam hal mendukung pekerjaan terkait penyampaian informasi. Teknologi media sosial membantu mempermudah komunikasi di lingkungan kerja, khususnya dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan tugas-tugas akademik maupun umum. Selain itu, dukungan dari institusi dalam menyediakan akses teknologi seperti internet semakin mempermudah proses tersebut (Marsal, 2018).

c. Dampak Media Sosial Pada Orang Tua

Penggunaan media sosial di kalangan orang tua di Indonesia telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Setiap hari, mereka sering membuka smartphone untuk menjelajahi dunia baru dan berkomunikasi dengan orang lain melalui platform media sosial. Interaksi di media sosial dapat memiliki dampak signifikan, memungkinkan orang tua untuk mengakses informasi dan berita dengan cepat. Namun, media sosial juga memiliki sisi negatif, seperti risiko kecanduan, yang dapat memengaruhi kualitas interaksi mereka dengan anak-anak dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak mengganggu hubungan keluarga dan pengasuhan yang baik (Marlina, 2018).

B. Politik

1. Pengertian Politik

Politik memiliki definisi yang bervariasi. Beberapa menggambarkannya sebagai seni dan ilmu pemerintahan, studi tentang negara, dan pembagian kekuasaan. Pada dasarnya, politik berkaitan dengan tindakan manusia dalam memperoleh, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan. (Rahman, A. 2018). Politik mencakup berbagai kegiatan dalam suatu sistem (sosial) yang melibatkan proses penentuan dan pelaksanaan tujuan (Budiarjo, 2008).

2. Pendidikan Politik

Pendidikan politik melibatkan percakapan antara pihak pendidik, seperti institusi pendidikan, pemerintah, partai politik, dan peserta didik, dengan tujuan meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamatan terhadap nilai, norma, dan simbol politik yang dianggap optimal dan positif. Partai politik dalam konteks sistem politik demokratis dapat memenuhi peran pendidikan politik melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan kepemimpinan, diskusi, dan partisipasi dalam berbagai forum pertemuan (Kharisma, D. 2015).

Berikut penjelasan pendidikan politik menurut para ahli:

- a. Pendidikan politik dalam pengertian umum, yakni sosialisasi politik, adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Tanpa memandang suka atau tidak, sadar atau tidak, serta diketahui atau tidak, setiap anggota masyarakat, termasuk penguasa dan warga biasa, mengalami proses ini. Oleh karena itu, pendidikan politik dalam pengertian lebih spesifik adalah usaha yang disengaja untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat agar mereka benar-benar memahami dan menginternalisasi nilai-nilai politik dari sistem politik ideal yang ingin dibangun. Pemahaman ini akan menghasilkan sikap dan perilaku politik baru yang mendukung sistem politik ideal tersebut dan, bersamaan dengan itu, akan muncul pula budaya politik yang baru (Alfian, 1990, hlm 245-246 dalam jurnal Kharisma Dwi, 2015).
- b. Tujuan pendidikan politik adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara optimal dalam sistem politik mereka. Untuk menjalankan tugas partisipatif sesuai dengan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, diperlukan kemampuan rakyat. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:
 1. Bacaan seperti surat kabar, majalah, dan publikasi massa lainnya yang membantu membentuk opini publik.
 2. Media audio visual seperti siaran radio, televisi, dan film.
 3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat, seperti tempat ibadah seperti masjid atau gereja yang digunakan untuk menyampaikan khotbah, serta

lembaga pendidikan baik formal maupun informal (Kantaprawira, 2004, hlm 55).

- c. Sosialisasi politik terdiri dari dua aspek utama: pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik adalah proses interaktif antara pengirim dan penerima pesan. Melalui proses ini, masyarakat dapat mengenali dan memahami nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negara mereka melalui berbagai entitas dalam sistem politik, seperti lembaga pendidikan, pemerintah, dan partai politik (Surbakti, 1999, hlm 117).

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk berkontribusi secara aktif dalam kehidupan politik. Aktivitas ini meliputi pemilihan pemimpin negara dan berpengaruh pada kebijakan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung (Budiardjo, 2008, hlm 367 dalam Ratnamulyani, 2018).

Terdapat beberapa jenis kriteria partisipasi politik, sebagai berikut: (Fadiyah, 2018)

- a. Berkaitan dengan aktivitas nyata

Partisipasi politik meliputi tindakan yang bisa dilihat secara langsung, bukan hanya sekadar pandangan atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, fokusnya adalah pada hal-hal yang bersifat objektif, bukan subjektif.

- b. Keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik

Ini mencakup kegiatan politik yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai warga biasa, baik secara langsung maupun melalui perantara.

- c. Memiliki tujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah

Aktivitas-aktivitas ini dilakukan dengan tujuan mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik melalui persuasi, tekanan, atau bahkan penolakan terhadap tokoh politik maupun kebijakan pemerintah.

- d. Fokus pada pengaruh terhadap pemerintah

Kegiatan ini diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, tanpa mempertimbangkan apakah hasilnya nanti akan berhasil atau gagal.

e. Dapat dilakukan melalui cara yang konvensional atau tidak konvensional

Partisipasi ini bisa dilakukan melalui prosedur resmi dan damai (konvensional), atau dengan cara yang menyimpang dari aturan yang berlaku dan bahkan menggunakan kekerasan (tak konvensional).

f. Aktivitas politik yang melibatkan individu atau kelompok

Partisipasi politik mencakup keterlibatan aktif seseorang atau sekelompok orang dalam proses politik, baik dalam pemilihan pemimpin negara maupun dalam upaya memengaruhi kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah.

4. Orientasi Politik

Orientasi politik merujuk pada pandangan dan sikap yang diadopsi oleh individu atau kelompok dalam konteks interaksi mereka dengan dunia politik. Ini mencakup nilai-nilai dan perilaku yang berkaitan dengan politik. Dalam konteks sistem politik di Indonesia, orientasi politik dianggap sebagai elemen penting dari partisipasi politik masyarakat. Meskipun orientasi dan partisipasi politik memiliki perbedaan, keduanya saling berkaitan (Surbakti, 1992 dalam Syahrul, 2020).

C. Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu proses politik untuk menentukan orang-orang yang akan menjabat dalam posisi politik, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Pemilu diadakan sebagai upaya untuk menciptakan negara demokratis, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan dukungan mayoritas suara. Dengan demikian, pemilu menjadi salah satu mekanisme dalam sistem demokrasi untuk memilih perwakilan rakyat yang akan menduduki posisi di lembaga perwakilan rakyat (Ratnamulyani, 2018).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008 tentang Pemilu, pemilih merujuk kepada individu yang merupakan warga Negara

Indonesia dan telah mencapai usia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah. Selanjutnya, pemilih yang memiliki hak pilih adalah warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam daftar pemilih oleh penyelenggara pemilu, dan pada hari pemungutan suara telah mencapai usia 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu.

2. Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun dan atau lebih atau sudah/pernah kawin yang mempunyai hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. (Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang PEMILU).

Pemilih pemula dalam politik adalah sekelompok individu yang baru pertama kali menggunakan hak pilih mereka. Mereka adalah orang-orang dalam masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suara dan mengikuti proses pemilihan, tetapi baru pertama kali melakukannya. Kelompok ini biasanya terdiri dari pelajar berusia 17-21 tahun, termasuk mahasiswa semester awal serta pemuda lainnya yang pada pemilu sebelumnya belum mencapai usia 17 tahun (Setiajid, 2011, hlm 11 dalam Rahman, 2018).

Karakteristik pemilih pemula, khususnya di kalangan pelajar SMA/MA/SMK, dapat digambarkan dengan beberapa ciri khas sebagai berikut: mereka umumnya berusia antara 17 hingga 19 tahun. Tingkat kesadaran politik atau pemahaman mereka terhadap isu-isu politik masih berada pada tahap awal. Pilihan serta pandangan politik mereka sangat dipengaruhi oleh figur-figur otoritatif seperti guru atau orang tua, sementara sebagian lainnya lebih dipengaruhi oleh kelompok sebaya. Selain itu, perilaku politik mereka saat memilih cenderung bersifat tidak stabil dan emosional, sehingga rentan terhadap perubahan di lingkungan sekitar (Sutisna, 2017).

D. Peserta Didik

1. Definisi Peserta Didik

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu (Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional).

2. Hubungan Peserta Didik Sebagai Pemilih Pemula

Peserta didik dalam konteks formal dapat diartikan sebagai individu yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, baik secara jasmani maupun mental. Aspek pertumbuhan berkaitan dengan perubahan fisik, sedangkan perkembangan lebih menekankan pada aspek psikologis. Proses ini memerlukan arahan serta bimbingan dari seorang pendidik untuk memastikan peserta didik mampu mengelola kedua aspek tersebut dengan baik (Rahmayulis, 2008, hlm 77 dalam Nasution, 2022).

Pemilih pemula adalah kelompok remaja yang masih berada dalam fase perkembangan, sehingga kemampuan mereka dalam membuat keputusan, khususnya yang berkaitan dengan politik, masih dalam tahap awal. Pada usia ini, mereka cenderung belum memiliki pengalaman yang cukup dalam mengambil keputusan politik secara matang dan rasional, sehingga memerlukan bimbingan untuk memahami pentingnya pilihan politik yang mereka buat (Beniman, 2022).

Dapat disimpulkan bahwa peserta didik, yang sedang mengalami perkembangan fisik dan mental, juga memainkan peran sebagai pemilih pemula ketika mereka mencapai usia pemilih. Proses pertumbuhan mereka tidak hanya mencakup aspek akademis, tetapi juga mencakup pengembangan kemampuan dalam membuat keputusan, termasuk dalam hal politik. Sebagai pemilih pemula, mereka sering kali belum memiliki pengalaman yang matang dalam menentukan pilihan politik, sehingga memerlukan bimbingan dari pendidik untuk memahami pentingnya tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, peserta didik sebagai pemilih pemula berada dalam fase penting di mana mereka membutuhkan arahan yang tepat untuk mengembangkan kesadaran politik yang baik.

3. Hubungan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dengan Orientasi Politik

Pemahaman peserta didik tentang politik di sekolah dibentuk melalui pengajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Dalam PPKn, yang berperan sebagai media pendidikan politik, peserta didik diajak mempelajari konsep-konsep demokrasi politik. Pembelajaran ini bertujuan untuk memperluas wawasan politik siswa dan membantu mereka mengembangkan orientasi politik yang lebih matang dan kritis. Hal ini diperkuat oleh pendapat yang diungkapkan oleh Winarno (2014) dalam Rahman (2020), pemahaman peserta didik mengenai politik di sekolah diperoleh melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mata pelajaran ini, yang juga dikenal sebagai pendidikan politik, berfokus pada pembahasan sistem demokrasi politik.

4. Hubungan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dengan Pemilih Pemula

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berperan penting dalam meningkatkan kualitas pemilih pemula dengan memberikan pemahaman tentang hak pilih, proses demokrasi, dan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu. Melalui proses pembelajaran, peserta didik diajarkan untuk memahami hak mereka dalam pemilihan umum dan cara menggunakan hak pilih secara bijaksana, dengan tujuan menghasilkan pemilu yang berkualitas. Pentingnya pendidikan pemilih secara berkelanjutan di sekolah dapat dilakukan melalui pendekatan yang menarik, seperti simulasi pemilu dan penggunaan materi edukatif yang disesuaikan dengan budaya lokal. Strategi ini diharapkan dapat membentuk pemilih pemula yang rasional dan independen, sehingga mereka mampu membuat keputusan politik yang lebih baik (Hariyanti, 2023).

E. Hubungan Media Sosial Terhadap Orientasi Politik

1. Pemilih Pemula

Pemilih pemula merupakan kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam proses pemilihan. Sikap politik mereka cenderung dinamis dan dapat berubah-ubah, tergantung pada situasi serta berbagai faktor yang

memengaruhinya. Meskipun demikian, peran pemilih pemula memiliki nilai yang signifikan dalam setiap pemilihan umum. Kelompok ini menjadi sasaran penting bagi para kandidat yang ingin meraih posisi strategis. Siapa pun yang berhasil menarik perhatian pemilih pemula akan mendapatkan keuntungan besar, sementara kegagalan mendapatkan dukungan dari mereka bisa menjadi hambatan signifikan dalam mencapai target suara yang diharapkan (Wardhani, 2018).

Media sosial sangat berpengaruh terhadap orientasi politik pemilih pemula, karena menjadi sumber utama informasi politik dan memungkinkan diskusi serta interaksi yang aktif terkait isu-isu politik terkini. Melalui media sosial, pemilih pemula dapat membentuk opini dan keputusan politik mereka dengan lebih cepat dan dinamis. Penelitian oleh Arifin (2024) juga memperkuat hal ini, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam membentuk keputusan pemilih pemula pada pemilu 2024 di Indonesia. Arifin menemukan bahwa tren politik di media sosial dapat mempengaruhi persepsi kolektif pemilih pemula dan mendorong mereka untuk lebih aktif dalam proses pemilihan.

2. Peserta Didik

Peserta didik merupakan sekelompok individu yang ada di sekolah, “Peserta didik adalah pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi, ia ingin mengembangkan diri (mendidik diri) secara terus menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya” (Umar, 2010, hlm 52).

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu yang diteliti oleh Kafka (2022) Media sosial berperan penting dalam membentuk orientasi politik pemilih pemula peserta didik SMA. Melalui media sosial, mereka dapat mengakses informasi politik, berpartisipasi dalam diskusi, dan terhubung dengan kampanye politik. Media sosial dapat memperkuat pandangan politik yang ada atau mengubahnya, serta memengaruhi persepsi mereka terhadap partai politik, calon, dan isu-isu politik. Kampanye di media sosial juga dapat memobilisasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam politik dan meningkatkan partisipasi pemilih. Penting bagi mereka untuk mengembangkan kemampuan kritis dalam menilai informasi politik yang mereka terima.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti melakukan perbandingan antara hasil penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya untuk mendapatkan data yang akurat. Oleh karena itu, peneliti mengadakan perbandingan dengan beberapa penelitian, sebagai berikut:

- 1. Ratnamulyani (2018) “Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dikalangan Pelajar Di Kabuputen Bogor”**, hasil dari penelitian ini adalah di kalangan pemilih pemula sebagian bisa memanfaatkan dan melihat berbagai konten politik di media sosial sedangkan di kalangan para politisi di Kabupaten Bogor, masih belum mampu mengoptimalkan penggunaan media sosial dalam kampanye mereka, penggunaan media sosial belum dianggap urgent.
- 2. Pradana (2017) “Hubungan Media Sosial Dengan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kuantitatif di SMAN 89 Jakarta Timur)”**, hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat derajat hubungan yang rendah antara media sosial dengan partisipasi politik pemilih pemula. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat sedikit keterkaitan antara penggunaan media sosial dengan partisipasi politik dari pemilih pemula.
- 3. Razaqa (2016) “Pengaruh Media Sosial Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Siswa Pada Pemilu”**, penelitian ini mengungkapkan media sosial memiliki peran penting dalam membentuk orientasi politik pemilih pemula siswa SMA. Melalui media sosial, mereka dapat mengakses informasi politik, berpartisipasi dalam diskusi politik dan terhubung dengan kampanye politik dan aktivis. Media sosial dapat mempengaruhi pemilih pemula siswa SMA dengan cara memperkuat pandangan politik yang sudah ada atau mengubah pandangan politik mereka. Informasi yang tersebar di media sosial dapat mempengaruhi pemilih pemula siswa SMA. Partai politik dan calon pemilihan menggunakan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan kampanye, mempromosikan platform kebijakan, dan memobilisasi dukungan pemilih.
- 4. Dwiyanti (2023) “Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Warga Negara: Dampak Positif dan Dampak Negatif”**, penelitian ini

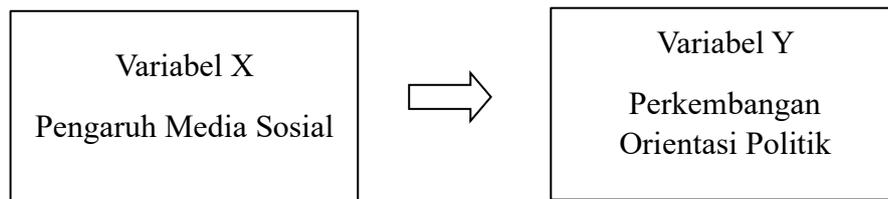
mengungkapkan bahwa pengguna media sosial memiliki dampak yang kompleks pada partisipasi politik, akses informasi politik dan keragaman pandangan politik. Penting bagi individu, masyarakat, dan pihak berkepentingan untuk mengembangkan kesadaran kritis, berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan politik yang berbeda, menghargai keanekaragaman pandangan politik, mempromosikan literasi digital, dan mempertimbangkan regulasi yang bijaksana.

- 5. Oktafitria (2016) “Media sosial sebagai Agen sosialisasi politik pada kaum muda”**, penelitian ini mendeskripsikan bahwa media sosial mampu menjadi Agen sosialisasi politik pada kaum muda titik sosialisasi politik sendiri dapat diterima apabila memperhatikan Agen sosialisasi apa yang paling mempengaruhi sebuah kelompok masyarakat tertentu titik Dalam hal ini, nilai, normal, dan budaya politik yang terdapat di dalam media sosial dapat diterima oleh kaum muda. Kaum muda memilih media sosial sebagai Agen sosialisasi dibandingkan keluarga, media massa institusi pendidikan, dan lembaga pemerintah karena pendekatan atau cara penyampaian yang dilakukan melalui media sosial berbeda dengan agen sosialisasi lainnya konten yang dimiliki media sosial dapat menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh kaum muda karena berkaitan dengan kondisi sosial mereka.

G. Kerangka Berpikir

Media sosial memiliki beragam fungsi dan kegunaannya, sehingga memungkinkan penggunanya dapat mengakses berbagai hal. Ini juga memungkinkan para pemilih pemula mengakses berbagai hal mengenai politik. Namun sejauh mana para pemilih pemula menggantungkan dirinya kepada media sosial untuk mengembangkan orientasi politiknya. Berikut merupakan kerangka berpikir dalam penelitian ini:

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir



H. Asumsi dan Hipotesis

Asumsi

Asumsi diartikan sebagai perkiraan atau anggapan suatu pemikiran yang dianggap benar atau valid tanpa adanya bukti konkret atau pengujian langsung. Asumsi digunakan untuk membuat prediksi atau membuat keputusan. Asumsi juga dapat digunakan sebagai dasar atau titik awal untuk menyusun teori atau merumuskan hipotesis. Dalam penelitian ini, asumsi peneliti adalah bahwa media sosial berpengaruh terhadap orientasi politik pemilih pemula peserta didik.

Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan sementara yang diuji dalam penelitian, mencakup dugaan, hubungan variabel, dan pengujian. Tiga langkah penting dalam memahami hipotesis yaitu mencari dasar, merumuskan teori yang menghubungkan variabel dan memilih metode statistik yang sesuai. Jadi, hipotesis adalah pernyataan yang akan diuji berdasarkan konteks yang dibahas serta menggunakan metode yang sesuai (Abdullah, 2015). Hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

“Adanya pengaruh media sosial terhadap perkembangan orientasi politik peserta didik”

Hipotesis statistik dirumuskan sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0,0$ berarti tidak ada pengaruh

$H_1 : \rho \neq 0$, berarti melebihi ataupun dibawah nol artinya adanya pengaruh

ρ = nilai korelasi di formulasi yang dihipotesiskan

H1: Terdapat pengaruh Media sosial terhadap perkembangan orientasi politik peserta didik

H0: Media sosial tidak mempengaruhi perkembangan orientasi politik peserta didik.